

**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM (BOSDA)
DI SEKOLAH DASAR NEGERI 06 KUBU RAYA**

Andika Okta Wijaya: Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.Pontianak.2013. e-mail : calibanbands@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengevaluasi proses pelaksanaan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) di SDN 06 Kabupaten Kubu Raya. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pelaksanaan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) di Kabupaten Kubu Raya masih ada kendala-kendala, salah satunya dikarenakan pembuatan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban tersebut belum memenuhi harapan serta sarana dan pengawasan yang kurang dari TIM Manajemen BOSDA Kabupaten Kubu Raya kepada SDN 06 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggung jawaban tersebut. Berdasarkan penelitian ini, untuk memperbaiki jalannya kebijakan program dana BOSDA di Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk TIM manajemen BOSDA dan penerima dana BOSDA yaitu SDN 06 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk saling mendukung dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kubu Raya. Pengawasan sebaiknya dilakukan secara berkala oleh TIM Manajemen BOSDA kepada sekolah – sekolah yang menerima dana BOSDA. Selain itu Kepala Sekolah diharapkan dapat mengatur pola pembiayaan operasional dan pemanfaatan dana BOSDA yang lebih efisien sehingga pelaksanaan kebijakan dana BOSDA bisa berjalan dengan apa yang di tetapkan oleh pemerintah daerah dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu.

Kata Kunci : Pelaksanaan BOSDA, Evaluasi BOSDA

Abstract

The purpose of this study was to determine on evaluation of the implementation proces of BOSDA in SDN 06 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Using qualitative methods and wih a descriptive approach. In the implementation of these activites, there are still many ostacles, ither because the manufacture and the pletion of this accouantability report is not accordance as expected and lack of sepervision from the BOSDA team. So that resulting in delaying submission of accouantability reports. Based on this reseacrh, the way this to fix this policy is supporting each other the implemitation of policies implemented in school. Monitoring should be done regularly. Principles must be able to arrange financing patterns and utilizatoin of funds BOSDA operating in efficienly, so that the implemenation of this policy can be felt by society.

Key Word : Implemenation BOSDA, Evaluation BOSDA

A. PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar, mutu, sarana- prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tatanan global.

Meskipun telah dilakukan sosialisasi tetap saja sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana BOSDA dirasakan belum efektif, seperti ditunjukkan besaran dana BOSDA dipakai untuk membayar guru tidak tetap atau guru honorer pada hal pembayaran guru tidak tetap atau guru honorer menggunakan anggaran Pemerintah Daerah atau alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selain itu keterlambatan dalam menyusun dan penyerahan laporan pertanggung jawaban juga karena pajak yang belum dibayar oleh pemerintah daerah ini juga salah satu masalah dalam program BOSDA yang dicanangkan oleh Bupati Kubu Raya.

Secara konseptual BOSDA diberikan kepada siswa/ siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan dilapangan belum sepenuhnya siswa/ siswi miskin/ tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan konsep program bantuan BOSDA sehingga perlu diluruskan. Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOSDA oleh sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RKAS, sebaliknya orang tua murid /wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekurangan anggaran sekolah yang sudah di tetapkan oleh sekolah. Dalam praktek, pihak Kepala Sekolah yang dominan untuk melakukan pengelolaan BOSDA, belum lagi masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) oleh sekolah tidak di publikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan kredibilitas masih diragukan.

Ketertarikan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan BOSDA adalah dana BOSDA tersebut tidak diberikan langsung kepada siswa akan tetapi diterima dan dikelola oleh sekolah dan program BOSDA belum pernah dievaluasi, baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain sehingga sampai saat ini belum mengetahui seberapa manfaat dan cakupan, pemertaan BOSDA bagi siswa/siswi miskin atau kurang mampu.

B. PENGERTIAN EVALUASI, EVALUASI PROGRAM, KEBIJAKAN

1. PENGERTIAN EVALUASI

Menurut Dunn (2000:608) istilah evaluasi secara umum dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisa hasil kebijakan/ program dalam arti satuan nilai. Dalam arti yang lebih khusus, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan/ program. Sehubungan dengan hal tersebut, Winarno (2002:166) mengartikan evaluasi kebijakan tidak hanya

dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam keseluruhan proses kebijakan. Selanjutnya Wibawa (1994:9) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan kiranya bermaksud untuk mengetahui 4 aspek, yaitu; (1) Proses pembuatan program; (2) Proses pelaksanaan program; (3) Konsekuensi program; (4) Efektivitas dampak program.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada evaluasi proses pelaksanaan program. Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2005:93) bahwa tolok ukur efektifitas proses pelaksanaan program diantaranya mencakup: (1) Sejauh mana pelaksanaan program sampai pada kelompok sasaran; (2) Apakah jumlah manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran sudah tepat; (3) Apakah sebuah program dilaksanakan sudah tepat waktu. Jadi penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, bagaimana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah di laksanakan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Evaluasi kebijakan merupakan aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan/ program serta berfungsi untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan suatu kebijakan/ program. Dengan evaluasi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program sehingga tujuan tercapai.

Dengan demikian secara singkat analisis dampak kebijakan "menggaris bawahi" pada masalah *what policy causes* sebagai lawan dari kajian *what causes policy*. Konsep evaluasi yang mempunyai arti sama dengan konsep kebijakan yang telah disebutkan di atas ; yaitu seperti pada apa yang pernah didefinisikan oleh (dye,1981;366-367) "*Policy evaluation is learning about the consequences of public policy*". "(Wholey. 1970. dalam Dye.1981).

Evaluasi Kebijakan adalah suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara "*policy impact / outcome and policy output*". "*Policy Impact / outcome*" adalah akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan

dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan "*Policy output*" ialah dari apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah (Islamy, 1994:114-115). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat mengacu pada adanya perubahan - perubahan yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan.

Pada penelitian ini dampak kebijakan lebih diarahkan pada kelompok sasaran kebijakan dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak mampu, berpendapatan rendah atau masyarakat miskin. Oleh karena itu untuk menjelaskan dampak kebijakan tersebut penelitian ini akan dilihat dan perspektif pemberdayaan siswa miskin dalam memperoleh akses pemerataan pendidikan.

Konsep yang relevan untuk mendekati pemberdayaan siswa, terutama kelompok masyarakat kurang mampu agar mempunyai akses dalam memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan. Menurut Usman (1993;7) ada 2 (dua) perspektif, yaitu: (1) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumberdaya (*resources allocation*), dan (2) perspektif yang memfokuskan perhatiannya kepada penampilan kelembagaan (*institutional performance*).

Perspektif pertama, ketidak berdayaan sekelompok masyarakat miskin tersebut dianggap sebagai akibat dari (atau sekurang-kurangnya berkaitan dengan) syndrome kemiskinan yang melekat pada kelompok itu sendiri. Fokus perhatian dalam perspektif ini yaitu pada alokasi sumber daya manusia. perspektif ini beranjak dari asumsi bahwa kondisi buruk suatu daerah pemukiman, perumahan, sanitasi lingkungan, nutrisi, rendahnya penghasilan. Sedangkan rendahnya penghasilan itu sendiri tidak hanya sekedar sebagai atribut dari kemiskinan melainkan juga sebagai faktor yang mempengaruhi bagi aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan.

Perspektif yang kedua ketidak berdayaan itu dianggap sebagai konsekuensi dari bentuk sistem penerimaan yang diskriminatif makin menguntungkan bagi sekelompok masyarakat kaya

dan merugikan untuk kelompok masyarakat miskin. Rendahnya akses bagi sekelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah pada kebijakan penerimaan siswa baru lebih dikarenakan sebagai konsekuensi (Usman. 1993:10).

Penelitian ini berangkat dari konsep perspektif kedua yaitu penampilan kelembagaan merupakan faktor yang mempengaruhi untuk menjelaskan akses di sekolah terhadap ketepatan sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan program dan ketepatan penggunaan dana BOS di SDN 06 Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Lemas (2004:6), saat ini belum ada kebijakan mendasar dari pemerintah untuk benar-benar membantu terselenggaranya pendidikan yang terjangkau masyarakat. Meskipun konstitusi sudah menyatakan pengalokasian anggaran 20 persen untuk pendidikan, implementasinya tidak semudah apa yang diamanatkan. Semua serba sporadis dan tidak jelas konsistensinya di lapangan. Misalkan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), yang belum apa-apa sudah menunjukkan penolakan dari sekolah tertentu karena tidak mau diaudit, ini menunjukkan masih lemahnya implmentasi program pemberian bantuan sebagai pengalihan dari pengurangan subsidi BBM, dengan kenyataan dan tuntutan di lapangan. Memang kuncinya terletak pada sejauh mana pengawalan dan pengwasan pelaksanaan kebijakan tersebut kalau dibiarkan saja, maka peneliti yakin tak akan bermanfaat atau sia-sia. Sebagaimana diberitakan, untuk menghindari penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekoiah Daerah (BOSDA). Bila ada sekolah yang terbukti menyimpang maka kepala sekoiah selaku penanggung jawab BOSDA akan dikenai sanksi.

Budhi (2004:6) menegaskan bahwa ; sekolah harus proaktif mendata siswa-siswa miskin di sekolahnya jangan bersikap pasif dan menunggu inisiatif siswa kalau sosialisasi berjalan baik dan ada sikap proaktif maka pengguliran dana BOS diyakini akan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

2. EVALUASI PROGRAM

Evaluasi berasal dari kata bahasa inggris

“*evaluation*” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “*evaluasi*” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (AS Hornby, 1986) evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti yang berdasarkan terjemahan, kata -kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan (Arikunto,2004:1). Suchman (dalam Anderson:1975:8) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari Worthen dan Sanders (dalam Anderson, 1975:10) evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan Stufflebeam (dalam Fernandes, 1984:45) mendefinisikan evaluasi sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Anderson (dalam Arikunto, 2004:1) memandang Evaluasi sebagai sebuah proses untuk menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam (dalam Arikunto,2004:1) mengungkapkan bahwa Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan Sedangkan Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Ditjen PLS Depdiknas (2002:2) memberikan pengertian Evaluasi program adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, dan sistematis dengan menggunakan

metode dengan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan. Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan. Ralp Tyler, 1950 (dalam Arikunto, 2004:78) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach (1963:34) dan Stufflebeam (1971:75) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Menurut Stake (1967), Stufflebeam (1959) Alkin (1969) (dalam Arikunto,2004) mengemukakan bahwa evaluasi berfokus pada 4 aspek yaitu :Konteks, Input, Proses implementasi , Produk. Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) yaitu evaluasi program yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu : Indikator *input*, Indikator *process*, Indikator *outputs*, Indikator *outcomes*.

Menurut Beni Setiawan (1999:20) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Bapenas, tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2004:14) Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan. Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan

evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

3. KEBIJAKAN

Mustopadidjaja menyatakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melaksanakan kegiatan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan (2003,5). Anderson (1978 :3) mengemukakan bahwa “ *public policies are those policies developed by governmental bodies and official* Hal ini berarti kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah, baik itu badan-badan, lembaga-lembaga ataupun pejabat-pejabatnya.

Dunn (2000:80) mendefinisikan " kebijakan publik merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapai hasilnya." Sedangkan Thomas R Dye, James O. Anderson dan David Hasron dalam Subarsono (2005:8), merumuskan pengertian kebijakan publik sebagai “kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mempunyai tujuan tertentu, kebijakan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.” Soenarko (1998 : 41) memperjelas kembali dalam bukunya definisi kebijakan adalah istilah yang menunjukkan proses, karena merupakan hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifat untuk dilaksanakan. Kebijakan merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang maka mengandung berbagai macam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan terealisasinya tujuan kebijakan itu.

Kebijakan publik pada intinya adalah bentuk keputusan atau tindakan pemerintah, yang merupakan hasil respon pemerintah terhadap masalah publik yang masuk ke

dalam agenda kebijakan. Keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah ini bisa berupa keputusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena terkadang tidak melakukan sesuatu adalah keputusan terbaik yang bisa dilaksanakan.

Dalam bukunya Tachjan (2006,15) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat dimana yang bersangkutan berada lebih lanjut Tachjan (2006 : 24) juga mengatakan bahwa kebijakan publik yang berkualitas tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para administrator publik, tetapi harus berisi pula opini publik sebagai representasi dari kepentingan publik.

Menurut Dunn (1994:71) “ sistem kebijakan atau pola instutisional melalui mana kebijakan dibuat, mengandung tiga elemen yang memiliki hubungan timbal balik, yakni : kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan”. Dari pendapat Dunn, terlihat bahwa dalam proses kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga faktor yakni kebijakan publik itu sendiri, pelaku kebijakan yaitu para administrator atau para birokrat kita serta lingkungan kebijakan yang berarti lingkungan darimana masalah publik diangkat menjadi agenda kebijakan, lingkungan tempat pembuatan kebijakan maupun lingkungan pengimplementasian kebijakan. Hal ini berarti pula bahwa efektivitas serta efisiensi implementasi kebijakan mendapat pengaruh dari kebijakan itu sendiri yakni elemen serta level dan isi kebijakan, pelaku kebijakan serta lingkungan kebijakan. Secara tersirat bermakna bahwa perilaku dan sifat pelaku kebijakan akan berpengaruh pada proses implementasi kebijakan itu sendiri.

Tachjan (2006:24) mengemukakan bahwa “implementasi merupakan terjemahan dari kata “*implementation*” berasal dari kata kerja “*to implent*” yang maknanya “ membawa

ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikann atau menyediakan sarana (alat) untuk meaksanakan sesuatu , memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Sehingga secara etimologis implementasi itu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk meaksanakan sesuatu dengan menggunakan alat atau sarana yang bertujuan untuk memperoleh hasil dimana hasil yang ingin dicapai bersifat praktis, dalam artian tidak berbelit-belit.

Kemudian Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2006:139), mendefinisikan implemenlasi kebijakan publik sebagai berikut “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

C. METODE PENELITIAN

Rancangan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif. Dalam rancangan ini peneliti berusaha dapat memberikan deskriptif yang jelas berkaitan dengan fokus kajian yakni hal-hal yang berkaita dengan evaluasi kebijakan namun disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pertanyaan penuntun. Peneliti sendiri langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Yang terdiri dari (a) Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Kabupaten Kubu Raya. (b) Manager BOSDA. (c) Orang tua dari murid yang mendapatkan bantuan BOSDA.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program BOSDA

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tujuan Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu.

Dalam UU 20/2003 pasal 3 tentang Pendidikan Nasional, Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun langkah - langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain;

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia,
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional,
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global,
4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral,
5. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan,
6. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar, mutu, sarana-prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa

Indonesia pada era globalisasi saat ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tatanan global.

Program BOSDA dilatarbelakangi oleh tingginya perhatian Bapak Bupati Kubu Raya terhadap dunia pendidikan, karena pendidikan adalah pondasi untuk memajukan suatu bangsa dimana bangsa kita yang sekarang ini adalah bangsa yang sedang berkembang menuju suatu tujuan yaitu kesejahteraan untuk rakyat. Pendidikan adalah salah satu bidang yang di utamakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya selain di bidang kesehatan dan infrastruktur daerah. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sejak Tahun 2010 juga telah rnelaksanakan program yang serupa dengan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya dalam memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik dari TKN, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Menejer BOSDA (AN,42 th) dengan pertanyaan sejak kapan program BOSDA mulai dilaksanakan?....

“... program BOSDA mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2010, program ini dicetuskan oleh bapak Bupati Kubu Raya karena menurut beliau pendidikan adalah kunci dari kesuksesan suatu bangsa”...pada tanggal 15 juli 2013 di ruang kerjanya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Menejer BOSDA dapat disimpulkan kalau program BOSDA ada karena perhatian yang tinggi oleh Bupati Kubu Raya yang beranggapan bahwa pendidikan adalah salah satu dari kesuksesan memajukan suatu bangsa.

Apa tujuan dari program BOSDA itu sendiri?

“...program BOSDA bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa dan siswi yang orang tua memiliki penghasilan rendah,

seperti petani dan buruh ”.... pada tanggal 15 juli 2013 di ruang kerjanya.

Dari hasil wawancara diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa program BOSDA memang dibuat untuk siswa dan siswi yang memiliki orang tua yang berpenghasilan rendah, dan program ini sudah pasti membantu orang tua si murid dalam sisi ekonomi.

Bagaimana proses pencairan dana BOSDA?

“...Proses pencairan dana dari KAS daerah menuju ke sekolah itu dimulai dengan veritifikasi rekening yg dimiliki oleh sekolah oleh Tim BOSDA Kubu Raya, kemudian dari Tim BOSDA memberikan hasil dari veritifikasi tersebut kepada bendahara daerah untuk ditindaklanjuti dalam pencairan dana tersebut ke sekolah”.... pada tanggal 15 juli 2013 di ruang kerjanya.

Dari jawaban menejer BOSDA penulis bisa menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan BOSDA semua hal sudah di atur dengan sebaik – baik nya dan sepraktis mungkin agar tidak terjadi suatu masalah yang dapat membuat setiap kepala sekolah bingung dalam proses pencairan dana tersebut.

Sedangkan untuk wawancara penulis dengan Kepala Sekolah (IWP, 52 th) SDN 06 Kabupaten Kubu Raya dengan pertanyaan apakah dana BOSDA pernah mengalami keterlambatan dalam pencairannya?...

“... belum pernah karena dananya langsung ditransfer kerekening yang dimiliki oleh sekolah yang sudah di verifikasi oleh Tim BOSDA, sehingga apabila sudah mulai memasuki tahun ajaran baru dana itu tinggal digunakan untuk keperluan murid – murid baru” pada tanggal 15 juli 2013 di ruang kerjanya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah program BOSDA memang direncanakan dengan matang sehingga sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses pencairan dana tersebut.

Dan bagaimana tanggapan orang tua murid tentang dana BOSDA?...

“...jelas sekali orang tua murid merasa senang dengan bantuan tersebut karena menurut mereka sangat meringankan beban ekonomi yang seharusnya digunakan untuk sekolah anak, sekarang dapat digunakan untuk keperluan yang lainnya’.... pada tanggal 15 juli 2013 di ruang kerjanya.

Berdasarkan keterangan dari Kepala sekolah program BOSDA sangatlah membantu orang tua murid, karena dana dari BOSDA tersebut digunakan untuk membeli seragam serta tas untuk anak-anak mereka.

Demikian juga hasil wawancara penulis dengan salah satu orang tua murid (TR, 38 th) yang mendapatkan bantuan dana BOSDA...

“... dana dari BOSDA sangatlah membantu saya dari segi ekonomi, karena saya tidak perlu lagi membelikan seragam dan tas untuk anak saya, paling yang saya belikan untuk anak saya hanya sepatu dan buku tulis saja, saya berharap program ini dapat berlanjut kalau bisa si selamanya”... pada tanggal 15 juli 2013 di depan warung sekolah.

Pendapat tersebut hampir sama dengan sejumlah orang tua murid yang penulis wawancarai, yaitu mereka sangat terbantu dari segi perekonomian dan meringankan beban untuk menyekolahkan untuk anaknya

Keterangan diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program BOSDA itu sangat membantu msasyarakat untuk menyekolahkan anak – anak mereka, dan sekolah sebagai perantara juga tidak susah payah dalam menjalankan program tersebut karena sudah dipandu oleh Tim BOSDA untuk apa saja uang yang didapat tersebut.

2. Evaluasi BOSDA

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah program pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional dan non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar, namun ada

beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOSDA.

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diberikan oleh pemerintah pada lembaga pendidikan, wajib belajar pendidikan nasional 12 tahun, yaitu SD, SLTP, SMA dan SMK yang berstatus Negeri di wilayah pemerintahan Kabupaten Kubu Raya sebagai pengganti dana operasional yang biasa dipungut dari anak-anak didik lembaga pendidikan tersebut, sehingga dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini semua anak didik di setiap lembaga yang mendapatkan bantuan BOSDA ini dibebaskan dari iuran SPP yang biasanya dibayar setiap bulan. Dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah ini, maka akan lebih meringankan beban para orangtua siswa dengan dihilangkannya biaya SPP bulanan.

Kepala sekolah dan seluruh staf pengajar yang ada, juga merasakan kemudahan yang didapat dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah karena proses yang tadinya dimulai dari mengumpulkan biaya dari tiap siswa, menjadi hanya tinggal melaksanakan dan mengelola dana yang sudah ada sesuai dengan aturan dan petunjuk penggunaan dari pemerintah mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Menejer BOSDA dengan pertanyaan apakah program ini sudah diimplementasikan dengan baik di sekolah – sekolah yang mendapatkan dana BOSDA?...

“... dari laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh sekolah kepada Tim BOSDA, kami melihat sudah baik dalam mengimplementasikan program BOSDA tersebut, Cuma masih banyak yang salah dalam cara membuat buku laporan pertanggungjawaban, paling itu saja yang masih menjadi masalah, nanti kita akan pandu lagi mereka dalam tata cara membuat laporan pertanggungjawaban”.... pada tanggal 15 juli 2013 di ruang kerjanya.

Dilihat dari pernyataan diatas program BOSDA sudah berjalan lancar, baik itu dari Tim BOSDA serta sekolah yang terdaftar menjadi

penerima program BOSDA, masalah hanya terdapat pada pembuatan laporan yang diserahkan dari sekolah kepada Tim BOSDA, penulis memaklumi dalam hal itu karena sekolah dasar tidaklah memiliki bagian tata usaha yang biasa membuat laporan pertanggungjawaban serta yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah dengan pertanyaan soal laporan pertanggungjawaban...

“...kita sebagai pihak sekolah dalam membuat laporan pertanggungjawaban, ya kita buatlah sebisa mungkin, ya walaupun hanya beberapa orang saja staf sekolah dan guru yang mengert dalam tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban”.... pada tanggal 15 juli 2013 di ruang kerjanya.

Selain itu apakah dana DOSDA juga digunakan untuk membeli buku teks pelajaran?

“...kalau untuk buku pelajaran kita pakai dari dana yang lain, karena dana dari BOSDA hanya untuk membeli perlengkapan sekolah buat murid dan untuk membeli beberapa peralatan untuk ekstrakuliker seperti drumban dan perlengkapannya.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kalau sekolah belum diberikan sosialisasi tentang tata cara dalam membuat laporan. Selain itu dana yang diterima oleh sekolah belum cukup untuk membeli buku teks pelajaran untuk para murid.

Selain tentang dana apakah semua murid baru dipasatkan mendapat BOSDA?

“...tentu saja tidak, kita akan memanggil semua orang tua murid baru dan kita dan memberikan pengertian kepada orang tua yang bisa tergolong orang kaya untuk tidak menerima bantuan tersebut, tetapi itu kembali lagi kepada orang tua tersebut bersedia memberikan bantuan tersebut kepada siswa yang lain apa tidak, pihak sekolah tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang tua, karena bantuan itu memang di khususkan untuk murid baru, apabila orang tua

yang tergolong kaya bersedia memberikan bantuan itu kepada murid lain, sekolah akan dengan senang hati membantu mencarikan murid yang benar-benar membutuhkan, walaupun murid itu bukan kelas satu tetap saja bisa diberikan bantuan tersebut.”

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa sekolah sangat pro aktif dalam membantu murid-muridnya yang kurang mampu.

E. PENUTUP

1. Pelaksanaan program dana BOSDA dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya program BOSDA sudah dilakukan oleh pihak Tim BOSDA dan sekolah SDN 06 Sungai Raya dengan baik, dimulai dengan verifikasi nomor rekening yang dimiliki oleh sekolah serta cara pencairan dan penyaluran dana tersebut. Maka dari itu saran saya program ini harap terus dilanjutkan walaupun bupati Kubu Raya sudah berganti dengan orang lain, karena program ini sangatlah membantu orang tua murid yang kurang mampu.
2. Hasil dari penelitian yang berupa evaluasi yaitu dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban masih ada sekolah yang masih salah dalam membuat laporan pertanggungjawaban tersebut dikarenakan pihak Tim BOSDA belum memberikan sosialisasi dalam tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban, selain itu dana yang diberikan kepada sekolah bisa dibiliang masih kurang untuk membeli buku teks pelajaran, serta tentang program itu sendiri yang menyamaratakan status sosial dengan memberikan seragam kepada seluruh anak murid baru, padahal tidak semua murid baru itu adalah murid yang memiliki orang tua yang kurang mampu. Oleh karena itu saya memberi saran, bahwa sebelum mengimplementasikan sebuah program sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu program tersebut mulai dari pencairan dana hingga tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban sehingga tidak lagi ada kesalahan yang menggagu program tersebut,

selain itu untuk pembelian buku eks pelajaran tidaklah semua hal harus dilakukan dalam satu waktu melihat dana yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat terbatas, untuk soal program itu sendiri yang menyamaratakan status sosial seluruh siswa baru, menurut saya itu benar supaya tidak ada kesenjangan sosial di antara murid dan orang tua murid, saya setuju dengan ide dari kepala sekolah yang ingin mengalihkan dana tersebut kepada murid yang benar-benar kurang mampu.

F. REFERENSI

- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William, N. 2000 *Pengantar Kebijakan Publik* penerjemah: Samodra W. Diah.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajahmada Press.
- Winarno, Budi, 2004, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Edisi/Cetakan Kedua, Media Pressindo, Jogjakarta
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul Wahab, Sholichin.M.A. 2005. *Analisis Kebijaksanaan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Zaenal Hidayat. 2002. *Analisis Data atau Pengolah Data Kualitatif*. Media Pressindo, Jogjakarta
- Wholey. 1970. *Federal Evaluation Policy; Analyzing The Effect of Public program*.